

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Y adalah perusahaan kosmetik yang sudah berdiri pada tahun 1989 dan berubah nama pada tahun 2006 menjadi PT X. PT X merupakan pemilik merek resmi yang bertempat di Bandung, Jawa Barat. Pada September 2015 PT X berubah kepemilikan, tetapi tetap memakai nama dan merek yang sama seperti sebelumnya. Saat ini PT X beroperasi di Surabaya sebagai kantor pusat dan memiliki 4 gudang utama yaitu di Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Makassar.

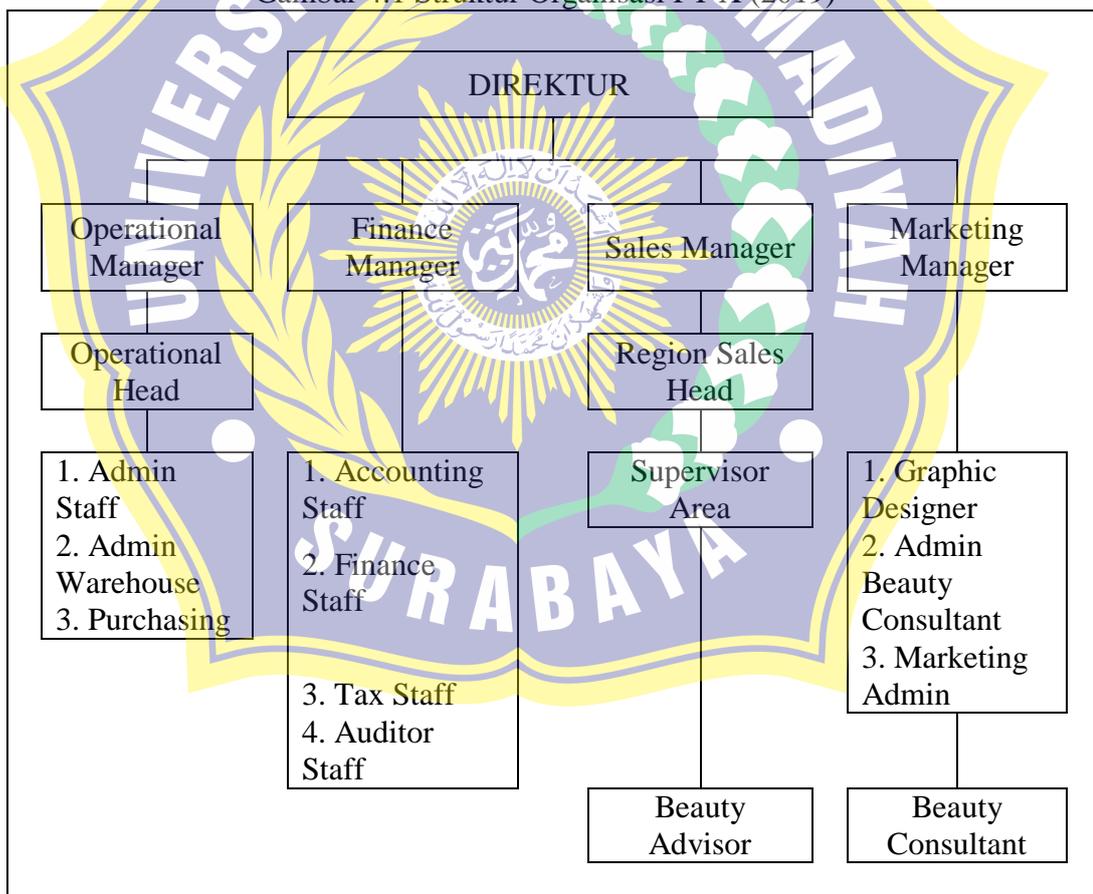
PT X merupakan salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia yang menerapkan kosmetik halal dan telah memiliki sertifikat halal resmi dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Beberapa nomor notifikasi yang telah terdaftar di BPOM yaitu NA18171204100 untuk salah satu produk *mascara* dan NA18171300675 untuk salah satu produk *lipstick*. Merek PT X saat ini menyediakan berbagai produk kecantikan dan *skincare* khusus untuk wajah diantaranya adalah *lipstick*, *foundation*, *face pallete makeup*, dan lain sebagainya. Dalam hal produksi untuk barang dagang, PT X bekerjasama dengan salah satu pabrik kosmetik yang beroperasi di Jakarta tetapi masih dalam naungan *business company* yang sama dengan PT X. Meskipun produksi barang dagang dilakukan oleh PT lain, tetapi semua konsep, model, komposisi, warna atas barang yang diproduksi sesuai permintaan PT X sebagai pemilik merek dagang.

2. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka diharapkan setiap bagian dapat melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya struktur organisasi akan menyajikan gambaran yang jelas tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab. Adapun struktur organisasi PT X adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT X (2019)



Sumber : Data PT X (2019)

Tugas dan wewenang setiap struktur organisasi :

a. Operational Division

Divisi ini merupakan divisi yang bertanggungjawab dalam hal menerima *sales order* dari bagian penjualan, pengiriman barang ke *customer* (pembeli), menjaga *stock* barang dalam gudang, melakukan pembelian *stock* barang dagang, dan sebagainya.

Divisi operasional ini memiliki tim yang berada di beberapa gudang diantaranya gudang Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Setiap cabang gudang memiliki tugas dan wewenang yang sama, dimana selanjutnya harus memberikan laporan berkala ke kantor pusat di Surabaya.

b. Finance Division

Finance Division memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana perusahaan. Setiap tagihan yang masuk akan dicek dan dilakukan pembayaran oleh divisi ini, tentunya setelah di setujui dan diotorisasi oleh Direktur.

Accounting memiliki tugas dalam pembuatan laporan keuangan yang nantinya laporan keuangan tersebut menjadi informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan serta sebagai pengambil keputusan ekonomi selanjutnya bagi perusahaan.

Tax merupakan bagian yang memiliki tugas dalam hal pencatatan, penghitungan, dan pelaporan segala jenis pajak mulai dari PPN, PPh 23, PPh 4 ayat 2, Pajak Tahunan dan sebagainya.

Auditor memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan *intern* baik secara *stock*, *cash in hand*, dan laporan keuangan.

c. Sales Division

Sales Division dibagi dalam beberapa area dan setiap area memiliki *Regional Sales Head (RSH)* masing-masing yang memiliki tugas untuk mencari *customer* baru, menjaga hubungan baik dengan *customer* yang sudah ada, melakukan kunjungan berkala ke *customer*. Pembagian RSH PT X adalah area Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat (Jabar), Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), dan Jawa Timur – Nusa Tenggara.

Setiap RSH memiliki tim yang disebut *Supervisor Area* dan memiliki tugas serta tanggung jawab atas *Beauty Advisor* yang ditempatkan di beberapa lokasi *customer*.

d. Marketing Division

Marketing Division memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal *update social media* perusahaan baik secara *update* produk terbaru, melakukan promosi, dan melakukan *Beauty Class*.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

PT X merupakan salah satu perusahaan kosmetik di Indonesia. Aktivitas penjualan PT X 90% adalah secara kredit ke beberapa distributor dan toko. Termin pembayaran yang diberikan oleh PT X kepada *customer* adalah 2 (dua) bulan untuk distributor dan 1 (satu) bulan untuk toko.

Untuk menerapkan *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2018 pada PT X didasarkan pada hasil transaksi yang terjadi pada tahun 2018, yang merupakan pedoman dalam pembahasan PPN. Dalam penelitian ini informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan.

Penerapan PPN Keluaran atas penjualannya yang dilakukan oleh PT X adalah sebagai berikut :

- a. Membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), baik atas barang yang telah dan belum diterima pembayarannya.
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak.
- c. Menyetor pajak terutang Pajak Pertambahan Nilai ke kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yang dilaporkan.
- d. Menyampaikan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.

Dalam membayar dan melaporkan pajak PPN, PT X menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan. Dimana Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak lebih besar nilai Pajak Keluaran daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN Terutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Apabila yang terjadi kebalikannya yaitu lebih besar Pajak Masukan daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan lebih bayar yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT X dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 PPN Terutang PT X Tahun 2018.

Masa	PPN Masukan Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Keluaran Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Terutang Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	Kompensasi Masa Sebelumnya (Rp)	Bayar (Rp)	Kompensasi (Rp)
Jan-18	13.056.393	125.826.600	(112.770.207)		112.770.207	-
Feb-18	64.992.221	113.558.911	(48.566.690)		48.566.690	-
Mar-18	45.288.016	134.424.995	(89.136.979)		102.690.586	13.553.607
Apr-18	80.156.767	159.134.331	(78.977.564)	13.553.607	65.423.957	-
Mei-18	54.160.170	209.462.267	(155.302.097)		155.302.097	-
Jun-18	86.144.411	134.883.773	(48.739.362)		48.739.362	-
Jul-18	179.431.762	204.136.264	(24.704.502)		28.398.915	3.694.413
Agust-18	273.708.986	300.558.217	(26.849.231)		28.308.311	1.459.080
Sep-18	171.569.817	309.816.998	(138.247.181)	1.459.080	136.788.101	-
Okt-18	208.839.820	234.203.726	(25.363.906)		25.363.906	-
Nop-18	253.892.504	328.397.999	(74.505.495)	3.694.413	141.571.131	70.760.049
Des-18	219.219.399	264.989.590	(45.770.191)	70.760.049	50.868.636	75.858.494
Total	1.650.460.266	2.519.393.671	(868.933.405)	89.467.149	944.791.899	165.325.643

Sumber: Data PPN Terutang PT X (2018)

Tabel 4.1 merupakan nilai PPN Masukan, PPN Keluaran, PPN Terutang, dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT X pada tahun 2018. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa ada beberapa bulan kompensasi atas lebih bayar PPN. Hal itu dapat terjadi karena perusahaan beberapa kali melakukan pembetulan. Sehingga PPN Terutang yang sudah dibayarkan menjadi lebih bayar karena ada penurunan nilai PPN Keluaran. Penurunan nilai PPN Terutang terjadi karena adanya pembatalan faktur pajak dikarenakan pembelian yang dibatalkan ataupun kesalahan teknik lainnya.

2. Penerimaan PPN Masukan.

Pengkreditan Faktur Pajak Masukan merupakan salah satu pengurang beban Faktur Pajak Keluaran. Oleh karena itu, penerimaan Faktur Pajak Masukan harus dimaksimalkan untuk pengkreditan Pajak Keluaran.

PT X selalu mengumpulkan semua Faktur Pajak Masukan yang diterima oleh perusahaan. Adapun berikut total Faktur Pajak Masukan yang diterima oleh PT X pada Tahun 2018.

Tabel 4.2 Total Penerimaan PPN Masukan Tahun 2018

Masa	Total Penerimaan PPN Masukan (Rp)	PPN Masukan Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Masukan Belum Dikreditkan (Rp)
Jan-18	13.056.393	13.056.393	-
Feb-18	65.172.221	64.992.221	180.000
Mar-18	45.288.016	45.288.016	-
Apr-18	80.156.767	80.156.767	-
Mei-18	57.677.670	54.160.170	3.517.500
Jun-18	88.094.411	86.144.411	1.950.000
Jul-18	180.431.762	179.431.762	1.000.000
Agust-18	277.822.019	273.708.986	4.113.033
Sep-18	171.569.817	171.569.817	-
Okt-18	208.839.820	208.839.820	-
Nop-18	253.892.504	253.892.504	-
Des-18	219.219.399	219.219.399	-
Total	1.661.220.799	1.650.460.266	10.760.533

Sumber : Data PT X (2018)

Tabel 4.2 menunjukkan total dari PPN Masukan yang telah diterima oleh PT X, serta PPN Masukan yang sudah dikreditkan dan belum dikreditkan oleh PT X. PPN Masukan yang belum dikreditkan oleh PT X dikarenakan ada beberapa PPN Masukan yang terlewat oleh bagian pajak dan terlambat penerimaan faktur pajak hingga melewati masa yang diperbolehkan untuk dikreditkan.

3. PPN Keluaran yang Sudah Diterima Pembayaranannya

Pembuatan faktur pajak PT X selalu berdasarkan pada saat penyerahan BKP, padahal atas penyerahan barang tersebut belum tentu semua akan terbayarkan oleh *customer*. Oleh karena itu atas PPN Keluaran yang sudah dilaporkan berikut adalah total yang sudah diterima pembayarannya oleh PT X :

Tabel 4.3 Data Piutang Usaha PT X

Masa	PPN Keluaran Sebelum <i>Tax</i> <i>Planning</i> (berupa nilai PPN saja) (Rp)	Terbayar (berupa nilai PPN saja) (Rp)	Belum Terbayar (berupa nilai PPN saja) (Rp)
Jan-18	125.826.600	125.826.600	-
Feb-18	113.558.911	113.558.911	-
Mar-18	134.424.995	134.065.761	359.234
Apr-18	159.134.331	159.134.331	-
Mei-18	209.462.267	205.732.281	3.729.986
Jun-18	134.883.773	133.811.139	1.072.634
Jul-18	204.136.264	195.550.978	8.585.286
Agust-18	300.558.217	298.163.137	2.395.080
Sep-18	309.816.998	295.739.873	14.077.125
Okt-18	234.203.726	222.023.144	12.180.582
Nop-18	328.397.999	298.087.582	30.310.417
Des-18	264.989.590	224.973.423	40.016.167
Total	2.519.393.671	2.406.667.159	112.726.512

Sumber : Data PT X (2019)

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa atas penyerahan BKP oleh PT X ke *customer* banyak yang belum diterima pembayarannya. Hal tersebut menjadi beban yang ditanggung oleh PT X karena harus membayar nilai PPN Keluaran atas penyerahan BKP yang pembayarannya belum mereka terima.

4. Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2018

Adapun Laporan Laba Rugi PT X pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2018

Keterangan	Rp
Penjualan Bersih	28.259.834.238
Harga Pokok Penjualan	(9.808.792.935)
Laba Kotor	18.451.041.303
Biaya Operasional :	
Bi Karyawan	10.793.483.642
Bi Kantor	2.499.344.925
Bi Manajemen	228.882.170
Bi Iklan Promosi	218.861.445
Bi Ekspedisi	352.143.363
Bi Penyusutan	253.875.728
Bi Sewa	764.161.499
Bi Entertain	200.953.937
Bi Pajak (Selain PPN)	15.634.606
Bi Pajak PPN	868.933.405
Bi Adm Bank	7.271.002
Bi Lain-Lain	382.900
Jumlah	16.203.928.622
Pendapatan Jasa Giro	33.944.620
Pendapatan Lain-Lain	-
Jumlah	33.944.620
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	<u>2.281.057.301</u>

Sumber : Data Laporan Keuangan PT X (2018)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa total beban pajak PPN PT X pada tahun 2018 adalah Rp 868.933.405. Nilai PPN Terutang tersebut tinggi dikarenakan tidak maksimal dalam mengkreditkan Pajak Masukan yang diterima dan tidak dilakukannya penundaan pembuatan Faktur Pajak Keluaran yang pembayarannya

belum diterima.

C. Pembahasan

Menurut Suandy (2017:137) dalam perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu dengan cara memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Cara lainnya yaitu penundaan pembuatan faktur pajak untuk penjualan yang pembayarannya belum diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, *Tax Planning* yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan (*Tax Planning 1*).

Untuk memaksimalkan pajak masukan yang dikreditkan, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Menggolongkan faktur pembelian barang yang PPNnya dapat dikreditkan.
- b. Cek tanggal terbit faktur pajak masukan yang diterima oleh perusahaan dan harus dilaporkan sebelum faktur pajak masukan tersebut *expired*.
- c. Faktur pajak dapat dikreditkan pada masa berikutnya maksimal 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan. Atas peraturan tersebut, apabila perusahaan dalam suatu masa pajak menerima pajak masukan yang dapat membuat lebih bayar, maka sebaiknya PPN masukan dilaporkan untuk masa berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X beberapa kali melewatkan Pajak Masukan yang diterima. Apabila PT X dapat memaksimalkan Pajak Masukan yang diterima, maka perhitungan PPN Terutang adalah :

Tabel 4.5 Simulasi Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Secara Maksimal

Masa	PPN Keluaran Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Masukan Setelah <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Terutang Setelah <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Terutang Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	<i>Cash Saving Tax Planning 1</i> (Rp)
Jan-18	125.826.600	13.056.393	112.770.207	112.770.207	-
Feb-18	113.558.911	65.172.221	48.386.690	48.566.690	180.000
Mar-18	134.424.995	45.288.016	89.136.979	89.136.979	-
Apr-18	159.134.331	80.156.767	78.977.564	78.977.564	-
Mei-18	209.462.267	57.677.670	151.784.597	155.302.097	3.517.500
Jun-18	134.883.773	88.094.411	46.789.362	48.739.362	1.950.000
Jul-18	204.136.264	180.431.762	23.704.502	24.704.502	1.000.000
Agust-18	300.558.217	277.822.019	22.736.198	26.849.231	4.113.033
Sep-18	309.816.998	171.569.817	138.247.181	138.247.181	-
Okt-18	234.203.726	208.839.820	25.363.906	25.363.906	-
Nop-18	328.397.999	253.892.504	74.505.495	74.505.495	-
Des-18	264.989.590	219.219.399	45.770.191	45.770.191	-
Total	2.519.393.671	1.661.220.799	858.172.872	868.933.405	10.760.533

Sumber : Data PT X diolah oleh penulis (2019)

Tabel 4.5 menunjukkan PT X akan menghemat beban pajak senilai Rp10.760.533 jika dapat maksimal dalam mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang diterima.

PPN Masukan yang telah diterima tetapi tidak dikreditkan oleh PT X merupakan suatu kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukannya langkah penertiban administrasi atas penerimaan PPN Masukan untuk mengurangi adanya *human error*. PPN Masukan yang terlewat terjadi karena adanya keterlambatan penerimaan PPN Masukan oleh bagian *Tax* dari bagian *Finance*.

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara setiap kali bagian *Finance* menerima tagihan berikut Faktur Pajak, maka bagian *Finance* wajib mencatat dalam Laporan Kas Harian dengan memisahkan antara nilai DPP tagihan dan PPNnya. Sehingga saat bagian *Tax* menerima Faktur Pajak dari bagian *Finance*, bagian *Tax* dapat cek dengan laporan kas harian apakah semua Faktur Pajak sudah

diterima atau belum.

2. Penundaan pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima (*Tax Planning 2*).

Pembuatan faktur pajak PT X selalu berdasarkan pada saat penyerahan BKP. Padahal atas penyerahan barang tersebut belum tentu semua akan terbayarkan oleh *customer*. Apabila terjadi pengembalian barang (retur) dari *customer*, maka seharusnya PT X bisa mendapatkan nota retur pajak untuk mengurangi PPN Terutang. Nota retur pajak hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tetapi tidak semua *customer* PT X merupakan PKP, 80% diantaranya adalah non PKP. Apabila perusahaan tidak mendapatkan nota retur pajak padahal penjualannya sudah dilaporkan maka hal tersebut merupakan suatu kerugian bagi perusahaan.

Oleh karena itu, salah satu *Tax Planning* yang dapat dilakukan adalah penundaan pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima oleh PT X. Berikut adalah tabel atas penjualan PT X Tahun 2018 yang pembayarannya sudah diterima.

Tabel 4.6 Simulasi Perhitungan setelah *Tax Planning* penundaan Faktur Pajak

Masa	PPN Keluaran Setelah <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Masukan Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Terutang Setelah <i>Tax Planning</i> (Rp)	PPN Terutang Sebelum <i>Tax Planning</i> (Rp)	Cash Saving <i>Tax Planning 2</i> (Rp)
Jan-18	125.826.600	13.056.393	112.770.207	112.770.207	-
Feb-18	113.558.911	64.992.221	48.566.690	48.566.690	-
Mar-18	134.065.761	45.288.016	88.777.745	89.136.979	359.234
Apr-18	159.134.331	80.156.767	78.977.564	78.977.564	-
Mei-18	205.732.281 133.811.139	54.160.170 86.144.411	151.572.111 47.666.728	155.302.097 48.739.362	3.729.986 1.072.634

Jun-18					
Jul-18	195.550.978	179.431.762	16.119.216	24.704.502	8.585.286
Agust-18	298.163.137	273.708.986	24.454.151	26.849.231	2.395.080
Sep-18	295.739.873	171.569.817	124.170.056	138.247.181	14.077.125
Okt-18	222.023.144	208.839.820	13.183.324	25.363.906	12.180.582
Nop-18	298.087.582	253.892.504	44.195.078	74.505.495	30.310.417
Des-18	224.973.423	219.219.399	5.754.024	45.770.191	40.016.167
Total	2.406.667.159	1.650.460.266	756.206.893	868.933.405	112.726.512

Sumber : Data PT X (2019)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa penghematan beban pajak dari penerapan *Tax Planning* dengan penundaan pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima menghasilkan penghematan beban pajak terutang yang harus dibayar secara mandiri oleh PT X dari yang awalnya senilai Rp 868.933.405 menjadi 756.206.893. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan takan mendapatkan penghematan berupa *cash saving* senilai Rp 112.726.512 atas *Tax Planning* berupa penundaan pembuatan faktur pajak.

Perlakuan akuntansi keuangan atas *Tax Planning* penundaan pembuatan faktur pajak yaitu pencatatan yang dilakukan hanyalah sebesar nilai DPP (Dasar Pengenaan Pajak) saja. Sedangkan PPN Keluaran yang ditunda dapat di jurnal Cadangan PPN Keluaran disebelah kredit.

Sebagai contoh, pada tanggal 1 November 2018 PT X melakukan penyerahan BKP Rp 10.000.000 secara kredit dengan asumsi piutang tak tertagih senilai Rp 3.000.000. Maka nilai PPNnya adalah Rp700.000 (10% dari Rp7.000.000 untuk penjualan yang tertagih) dan Rp300.000 (10% dari Rp3.000.000 untuk penjualan yang tidak tertagih) dan jurnalnya adalah:

Tabel 4.7 Pencatatan Akuntansi Keuangan

Tanggal	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
01 November 2018	Piutang Usaha	11.000.000	
	Penjualan		10.000.000
	PPN Keluaran		700.000
	Cadangan PPN Keluaran		300.000

Setelah dilakukannya *Tax Planning* yaitu memaksimalkan pengkreditan Faktur Pajak Masukan dan penundaan faktur Pajak Keluaran yang pembayarannya belum diterima, maka proyeksi total penghematan biaya pajak PPN yang diperoleh adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8 Simulasi Perhitungan Setelah *Tax Planning*.

Masa	<i>Cash Saving Tax Planning 1</i> (Rp)	<i>Cash Saving Tax Planning 2</i> (Rp)	<i>Total Cash Saving</i> (Rp)
Jan-18	-	-	-
Feb-18	180.000	-	180.000
Mar-18	-	359.234	359.234
Apr-18	-	-	-
Mei-18	3.517.500	3.729.986	7.247.486
Jun-18	1.950.000	1.072.634	3.022.634
Jul-18	1.000.000	8.585.286	9.585.286
Agust-18	4.113.033	2.395.080	6.508.113
Sep-18	-	14.077.125	14.077.125
Okt-18	-	12.180.582	12.180.582
Nop-18	-	30.310.417	30.310.417
Des-18	-	40.016.167	40.016.167
Total	10.760.533	112.726.512	123.487.045

Sumber : Data PT X diolah oleh penulis (2019)

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa penghematan pajak dari penerapan *Tax Planning* menghasilkan nilai pajak terutang yang harus dibayar secara mandiri oleh PT X dari yang awalnya senilai Rp 868.933.405 menjadi 745.446.360. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan mendapatkan penghematan berupa *cash*

saving senilai Rp 123.487.045.

Dari *Tax Planning* yang dilakukan sebelumnya maka akan menghasilkan Laporan Laba Rugi sebagai berikut :

Tabel 4.9 Laporan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah *Tax Planning*.

Keterangan	Sebelum Tax Planning (Rp)	Setelah Tax Planning (Rp)
Penjualan Bersih	28.259.834.238	28.259.834.238
Harga Pokok Penjualan	(9.808.792.935)	(9.808.792.935)
Laba Kotor	18.451.041.303	18.451.041.303
Biaya Operasional :		
Bi Karyawan	10.793.483.642	10.793.483.642
Bi Kantor	2.499.344.925	2.499.344.925
Bi Manajemen	228.882.170	228.882.170
Bi Iklan Promosi	218.861.445	218.861.445
Bi Ekspedisi	352.143.363	352.143.363
Bi Penyusutan	253.875.728	253.875.728
Bi Sewa	764.161.499	764.161.499
Bi Entertain	200.953.937	200.953.937
Bi Pajak (Selain PPN)	15.634.606	15.634.606
Bi Pajak PPN	868.933.405	745.446.360
Bi Adm Bank	7.271.002	7.271.002
Bi Lain-Lain	382.900	382.900
Jumlah	16.203.928.622	16.080.441.577
Pendapatan Jasa Giro	33.944.620	33.944.620
Pendapatan Lain-Lain	-	-
Jumlah	33.944.620	33.944.620
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	2.281.057.301	2.404.544.346

Sumber : Data PT X diolah oleh peneliti (2019)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa setelah dilakukannya *Tax Planning*

penghematan beban pajak yang diperoleh oleh PT X yaitu Rp 123.487.045.
Dimana nilai laba bersih sebelum pajak penghasilan menjadi Rp 2.404.544.346
yang mana sebelumnya Rp 2.281.057.301.

